



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN  
LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko Dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 156/PR.01.3-Kpt/7173/Kotas/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2020-2024
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 161/PR.01.3-Kpt/7173/Kota/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
1. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  2. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  3. Penetapan Tujuan Level Entitas, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  4. Identifikasi Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
  5. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

6. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko sebagaimana dalam terlampir dalam Keputusan ini; dan
7. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas;
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
Pada tanggal 12 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TOMOHON  
 NOMOR: ...TAHUN 2023 TENTANG  
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN  
 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TOMOHON TAHUN 2023

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

NO	KATEGORI RESIKO	TOPIK RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
I.	EKSTERNAL				
	Sosial dan Politik	Regulasi yang terlambat ditetapkan	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	
		Efektifitas Komunikasi Antar Lembaga	Terjadi Miskomunikasi Perbedaan Arah Kebijakan	Terhambatnya proses penetapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan	
		Regulasi yang berubah-ubah	Pemahaman yang tidak komprehe	Mempengaruhi Efektifitas pelaksanaan tahapan	
		Pengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat	Pandemi Covid-19 mempengaruhi kegiatan sosialisas	Penurunan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19	
	Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Anggaran refocusing	Ada Program-program yang tidak dijalankan	
	Lingkungan	Bencana Alam	Terhambatnya distribusi logistik ke daerah kepulauan	Mempengaruhi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tidak Tepat Waktu	
		Keterbatasan Lingkungan Kerja	Penggunaan Fasilitas Umum pada Apel senin pagi, tidak ada lahan parkir		
	Keuangan	Anggaran Pemilu	Pengusulan Anggaran Hibah yang Belum Disetujui Oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan Yang Sudah Di rencanakan Belum Bisa Dilaksana	
	IT & Infrastruktur	Keamanan	Jaringan IT Dan Kompute	Menghambat Tahapan Pemilu dan Pemilihan	
		Infrastruktur	Perangkat Internet Yang Kurang Mendukung	Terhambatnya Penguploadan Data	

NO	KATEGORI RESIKO	TOPIK RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
II	INTERNAL				
	Strategik	Kesesuaian Perencanaan	Ketidaksesuaian Antara Rencana Strategis Dengan Realisasi Kegiatan	Penilaian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Menurun	
	Personil	Kemampuan Badan Adhoc Masih Minim Dalam Memahami dan menerapkan Regulasi	Pelaksanaan Tugas Kurang Efektif	1. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Yang Tidak Sesuai Regulasi, 2. Terjadinya Sengketa Proses Dan Pelanggaran Admistrasi Pemilu dan Pemilihan Serta Pidana	
	Proses	Komunikasi Internal yang tidak maksimal	Hambatan terhadap pelaksanaan tupoksi	Kinerja sesuai dengan target belum tercapai	
	IT dan Infrastuktur	Upload Data Ke Pusat/Server	Respon Dari Server Pusat Lambat Dalam Pengupload Data	Terhambatnya Data	
		Inovasi	Banyak Aplikasi Pendukung Yang Dibuat Untuk Kelancaran Kerja Tetapi Penerapannya Di Lapangan Tidak Maksimal	Tidak Efisien	
	Keuangan	Kurangnya Tenaga Pendukung Di bagian Keuangan	Performa Kinerja Pengelola Keuangan Menjadi Kurang Maksimal	Tidak Maksimalnya Proses transaksi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Di Tengah Tahapan Pemilu dan Pemilihan Yang Padat	
	Informasi	Terlambatnya informasi terkait juknis tahapan	Persiapan tahapan pemilu menjadi tidak maksimal	Mempengaruhi kinerja pada badan adhock	

LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA		Kriteria Dampak			ASPEK	
Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum		
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katarsepek	(5)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
Besar	(4)	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
Sedang	(3)	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
Kecil	(2)	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
Tidak Signifikan	(1)	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
		Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
		Probabilitas/Likelihood				

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan <b>tindakan segera</b> untuk mengelola risiko ( <i>Unacceptable</i> )
9-12	ORANGE	3	Tinggi	Diperlukan <b>tindakan</b> untuk mengelola risiko ( <i>Issue</i> )
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya ( <i>Supliemetary Issue</i> )
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan ( <i>Acceptable</i> )

Penentuan Prioritas Risiko: Dalam menentukan prioritas risiko, Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut in

NO	Kriteria Resiko	Keterangan
1.	Risiko keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiscal Pemerintah Pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, Perpajakan, kepabeanaan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan Negara yang eliputi barang milik Negara (BMN), kekayaan Negara Yang dipisahkan, Infestasi Pemerintah, dan kekayaan Negara Lainnya.
2.	Risiko kebijakan	Risikoyang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal otrganisasi.
3.	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap Organisasi
4.	Risiko Fraufd	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengangdung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang /harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan satu individu atau lebih dilingkungan organisasi.
5.	Risiko Legal	Risiko yngg berkaitan dengan tuntutan/ gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak external, seperti wajib pajak atau Kementrian/Lembaga terhada peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atua ketentuan lain yang berlaku
7.	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Identifikasi Menggunakan hal 22 Peraturan MneteriHukum dan HAM nomor 5 tahun2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan an semesteran, Menggunakankata bantu jumlah dan presentase. Menentukan batas aman melihat dari data-data.
- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU.

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS				
Unit Pemilik Risiko		KPU Kota Tomohon		
Periode Penerapan		: 2023		
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan Yang Berlaku	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria.	Tidak Ada Masalah, karena pengelolaan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan logistik sudah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU
		Terlaksananya pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang Dikelola Dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- Undangan	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%
			Persentase Informasi produk hukum Yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU
3		Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase Tahapan Pemilihan/Pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	Semua Sudah Sesuai Jadwal Tahapan
			Persentase KPU Kota Tomohon melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Tidak Ada Masalah
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon	Tidak Ada Masalah, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Tomohon yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Tidak Ada Masalah, karena jumlah laporan disesuaikan Standar Akuntansi Pemerintah
			Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Tidak Ada Masalah, karena laporan sudah disesuaikan dengan laporan reformasi birokrasi
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan Efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Juknis pelaksanaan anggaran sering terlambat diterima sehingga menghambat kegiatan  anggaran untuk kegiatan yang sudah disusun dalam renstra tidak tersedia
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Tidak ada masalah, karena kebutuhan pegawai terhadap sarana dan prasarana sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik sesuai anggaran yang tersedia
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Belum terpenuhi dengan baik karena keterbatasan anggaran untuk sarana transportasi pegawai
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Tidak ada Masalah, karena fasilitas perkantoran yang ada saat ini sudah cukup memadai atau disesuaikan dengan anggaran tersedia
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kota Tomohon yang dapat dipenuhi	Belum memiliki gudang sendiri sehingga memerlukan anggaran sewa gudang per tahun
7	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Beberapa rekomendasi/temuan BPK yang telah ditindaklanjuti berupa temuan pokja telah disetor ke kas negara. Untuk semua temuan BPKP sudah ditindaklanjuti

## IDENTIFIKASI RISIKO

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
	Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria.	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan logistik sudah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tidak Ada	internal	C	Pengelolaan logistik yang baik akan berdampak pada suksesnya tahapan Pemilu/Pemilihan	Ketua KPU, Sekretaris, dan Kasubag KUL	Memahami regulasi logistik, membuat SOP, dan melaksanakan sesuai dengan prinsip logistik 4T + 1E (Tepat Waktu, Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Efisien)	Perubahan Juknis, Surat Edaran yang baru terkait logistik yang harus cepat disesuaikan dengan pelaksanaannya	Risiko Pengelolaan

Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP penyusunan Rancangan Keputusan sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100% Rancangan Keputusan KPU Kota Tomohon yang disusun dan Diharmonisasi Tepat waktu sesuai Dengan kerangka regulasi KPU	Kasubbag Hukum	Tidak ada	internal	C	Proses penyusunan suatu rancangan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ketua dan Anggota KPU Kota Tomohon, Sekretaris, Unit Kerja Pengusul, Unit Kerja Penyusun	Kartu Kendali sebagai bentuk kontrol yang ada dalam setiap penyusunan suatu rancangan keputusan.	Perubahan-perubahan ketentuan yang harus cepat dilakukan penyesuaian	Risiko Operasional
Persentase produk hukum yang Dikelola Dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-Undangan	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%	Kasubbag Hukum	Tidak ada	Internal	C	Proses pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubbag Hukum	Rapat Koordinasi maupun evaluasi per semester terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang dibutuhkan	Risiko Operasional

Persentase Informasi produk hukum Yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah berarti, karena penerapan SOP pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum sejauh ini masih konsisten dilaksanakan  Persentase 100%	Kasubbag HUKUM	Tidak ada	Internal	C	Proses pengelolaan informasi hukum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubbag Hukum	Rapat Koordinasi maupun evaluasi per semester terkait pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyebaran informasi hukum yang belum terlalu cepat disebabkan masih kurang stabilnya jaringan internet	Risiko Operasional
Presentase Tahapan Pemilihan/Pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	Tidak Ada Masalah	Tahapan Pemilihan berjalan sesuai jadwal tahapan yang berlaku. Presentase 100%	Kasubag Teknis & Hupmas	Tidak Ada	Internal		Tahapan berjalan lancar karena sesuai dengan tahapan	Kasubag Teknis & Hupmas	Melaksanakan sesuai juknis pelaksanaan tahapan	PKPU dan Juknis terbit mendekati waktu tahapan	Risiko Operasional
Persentase KPU Kabupaten Kota Tomohon melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Tidak Ada Masalah	Tahapan Pemilihan berjalan aman dan damai. Presentase 100%	Kasubag Teknis & Hupmas	Tidak Ada	Eksternal		Tahapan berjalan lancar, aman dan damai	Kasubag Teknis & Hupmas	Melaksanakan sesuai juknis pelaksanaan tahapan	Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga	Risiko Operasional

<p>Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tomohon</p>	<p>Terdapat kegiatan yang tersusun dalam renstra namun tidak tersedia Anggaran untuk dilaksanakan sehingga mempengaruhi nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja</p>	<p>Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun dalam renstra</p>	<p>Kasubag Program dan data</p>	<p>Pandemi covid 19 mengakibatkan dipangkasnya anggaran di dalam detail komponen akun sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran dan kegiatan yang sudah disusun di dalam renstra tidak dapat dilaksanakan seperti contohnya riset kepemiluan</p>	<p>internal</p>	<p>C</p>	<p>Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah disusun dalam renstra dan ditengah keterbatasan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan harus mengoptimalkan Anggaran yang tersedia</p>	<p>KPU Kota Tomohon</p>	<p>Melaksanakan anggaran sesuai juknis pelaksanaan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia</p>	<p>nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra</p>	<p>resiko pengelolaan</p>
<p>Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Tomohon yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>Tidak Ada Masalah</p>	<p>Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Akuntabilitas Laporan Keuangan</p>	<p>Ketua KPU, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik</p>	<p>Tidak Ada</p>	<p>Internal</p>		<p>Apabila jumlah laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah akuntabilitas laporan keuangan, maka akan berdampak pada penilaian laporan keuangan</p>	<p>KPU Kota Tomohon</p>	<p>Memahami regulasi keuangan dengan baik, membuat SOP, dan melaksanakan sesuai dengan jumlah laporan keuangan yang telah ditentukan</p>	<p>Adanya perubahan jumlah laporan sesuai dengan permintaan</p>	<p>Resiko pada pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri</p>

Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Pemahaman yang masih terbatas terkait pelaporan reformasi birokrasi	Pentingnya pemahaman secara menyeluruh terkait regulasi yang ada	KPU Kota Tomohon	Belum maksimalnya sosialisasi terkait pelaporan reformasi birokrasi	Internal		Belum maksimalnya pelaporan Reformasi Birokrasi	KPU Kota Tomohon	Memahami dan melaksanakan regulasi terkait reformasi birokrasi Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Jumlah laporan reformasi birokrasi masih sangat terbatas	Risiko Operasional
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Tidak ada masalah	Semakin sedikit satker melakukan revisi Anggaran maka perencanaan dinilai baik dan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran perlu dilakukan revisi oleh KPA	Kasubag Program dan data	tidak ada	internal	C	Melakukan revisi anggaran bermanfaat untuk mengoptimalkan realisasi anggaran	KPU Kota Tomohon	Pencermatan realisasi anggaran secara berkala untuk mencegah terjadinya pagu minus Anggaran	rendahnya realisasi dapat di atasi dengan melakukan revisi anggaran	resiko pengelolaan
Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Layanan Sarana dan Prasarana telah disesuaikan dengan anggaran tersedia dalam DIPA KPU Kota Tomohon	Layanan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kerja pegawai.	KPU Kota Tomohon	Anggaran layanan sarana dan prasarana yang terbatas	Internal		Sarana dan prasarana yang maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kota Tomohon	Memaksimalkan anggaran layanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Risiko Operasional

Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Layanan sarana transportasi masih sangat terbatas	Layanan sarana transportasi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai	KPU Kota Tomohon	Anggaran layanan sarana transportasi yang terbatas	Internal		Sarana transportasi maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kota Tomohon	Memaksimalkan anggaran sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan sarana transportasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	fasilitas perkantoran masih belum memadai	Layanan fasilitas perkantoran yang memadai akan sangat mendukung kinerja pegawai	KPU Kota Tomohon	Anggaran fasilitas perkantoran yang terbatas	Internal		Fasilitas Perkantoran maksimal akan menunjang kerja pegawai	KPU Kota Tomohon	Memaksimalkan anggaran fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai.	Terbatasnya layanan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan	Risiko Operasional
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kota Tomohon yang dapat dipenuhi	Sudah ada tapi perlu di renovasi	Gudang merupakan sarana yang sangat penting untuk menyimpan eks logistik yang masa retensinya bersifat permanen, serta barang-barang milik negara yang sudah tidak digunakan karena kondisi rusak	KPU Kota Tomohon	kelengkapan dokumen untuk mendapatkan anggaran renovasi gedung kantor dan Gudang.	Internal		Membutuhkan anggaran untuk renovasi Gedung kantor dan Gudang.	KPU Kota Tomohon	Membuat Usulan anggaran renovasi gudang	Memerlukan ruangan tambahan di kantor untuk menyimpan barang-barang yang semula berada di gudang	Risiko Operasional

Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Belum semua rekomendasi BPK dapat diselesaikan	Adanya TGR yang belum sepenuhnya disetor ke kas negara	KPU Kota Tomohon	Pelunasan TGR merupakan tanggung jawab dari masing-masing yang bersangkutan	Internal		Hasil temuan KPU Kota Tomohon akan tercatat terus sampai ada pelunasan TGR tersebut	KPU Kota Tomohon	Sekretaris dapat memberikan penjelasan melalui surat kepada masing-masing yang kena TGR untuk dapat melakukan pelunasan	TGR akan tetap tercatat jika belum ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker tersebut	Resiko dapat berdampak pada Satker dan masing-masing yang terkait didalamnya
---	--	--	------------------	---	----------	--	---	------------------	---	--	--

## PETA RISIKO

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Perubahan Juknis, Surat Edaran yang baru terkait logistik yang harus cepat disesuaikan dengan pelaksanaannya	Kecil	1	Maka pengelolaan logistik harus secepatnya menyesuaikan dengan juknis atau surat edaran terbaru agar pelaksanaannya bisa 4T + 1E (Tepat Waktu, Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, dan Efisien)	Rendah	1	1	Rendah
2	nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Tomohon berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra	Rendah	1	kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen kepemiluan sebelumnya dan UU serta PKPU	Rendah	1	1	rendah
3	Adanya perubahan jumlah laporan sesuai dengan permintaan	Kecil	1	Perubahan jumlah laporan dari Kementerian Keuangan akan langsung disesuaikan oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan	Rendah	1	1	Rendah
4	Hasil temuan TGR akan tetap tercatat jika belum ada pelunasan secara keseluruhan dari Satker tersebut	Sedang	2	Temuan berupa TGR tidak dapat dihapuskan dan akan terus tercatat di Laporan Keuangan KPU Kota Tomohon sampai dilakukan pelunasan atas TGR tersebut	sedang	4	8	Sedang
5	Terbatasnya layanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan sarana dan prasarana	Rendah	2	2	Rendah
6	Terbatasnya layanan sarana transportasi yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan sarana dan prasarana	Rendah	1	1	Rendah
7	Terbatasnya layanan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang layanan fasilitas perkantoran	Rendah	2	1	Rendah
8	Memerlukan ruangan tambahan di kantor untuk menyimpan barang-barang yang semula berada di gudang	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang pemeliharaan perkantoran	Rendah	1	1	Rendah
9	Jumlah laporan reformasi birokrasi masih sangat terbatas	Kecil	1	Pemahaman terhadap regulasi terkait reformasi birokrasi secara menyeluruh, baik dan benar	Rendah	2	2	Rendah
10	Rendahnya realisasi dapat diatasi dengan melakukan revisi anggaran	Kecil	1	Revisi POK dapat dilakukan oleh Sekretaris selalu Kuasa Pengguna Anggaran sehingga efektif dan efisien	Rendah	1	1	Rendah
11	Perubahan-perubahan ketentuan yang harus cepat dilakukan penyesuaian	Kecil	1	Pemahaman terhadap regulasi terkait secara menyeluruh, baik dan benar	Rendah	1	1	Rendah
12	Terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan dokumentasi hukum yang dibutuhkan	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang fasilitas perkantoran	Rendah	2	2	Rendah
13	Penyebaran informasi hukum yang belum terlalu cepat disebabkan masih kurang stabilnya jaringan internet	Kecil	1	Optimalisasi anggaran untuk menunjang penyebaran informasi hukum	Rendah	1	1	Rendah

14	PKPU dan Juknis terbit mendekati waktu tahapan	Kecil	1	Optimalisasi waktu pengesahan PKPU dan Juknis Tahapan	Rendah	1	1	Rendah
15	Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga	Kecil	1	Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi	Rendah	1	1	Rendah

Range	Warna	Level Risiko	
13-25	MERAH	4	Ekstrim
9-12	ORANGE	3	Tinggi
6-8	KUNING	2	Sedang
1-5	BIRU	1	Rendah

INDIKATOR RISIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	Batas Aman
					Indikasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU KotaTomohon</p> <p>berpotensi turun akibat tidak terlaksananya kegiatan yang sudah di susun dalam renstra</p>	1		1	<p>kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen kepemiluan sebelumnya dan UU serta PKPU</p>	90%
2	<p>Potensi berubahnya struktur lembaga mitra (kepolisian, kejaksaan, dsb) yang berisiko untuk memengaruhi koordinasi antar lembaga</p>	1		5	<p>Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi</p>	90%

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Ops Penangan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran dapat digantikan dengan alternatif lain yang lebih efisien sehingga tidak mengurangi output yang dihasilkan seperti contoh kegiatan riset yang tidak dilaksanakan dapat dicari alternatif yang lain dengan mempelajari dokumen kepemiluan sebelumnya dan UU serta PKPU	90%	diperlukan tindakan untuk mencari alternatif yang efektif dan efisien sesuai ketersediaan dan juknis pelaksanaan anggaran	webinar dan sharing knowledge dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien	laporan hasil kegiatan	3	bulanan	Kasubag Program dan Data	
2	Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga jika ada perubahan struktur organisasi	90%	Diperlukan Rapat Koordinasi berkala dengan stakeholder terutama lembaga mitra	FGD dan Rapat Koordinasi antar lembaga	laporan hasil kegiatan	6	bulanan	Kasubag Teknis dan Hupmas	

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
	webinar dan sharing knowledge dengan menggunakan anggaran yang efektif dan efisien	Meningkatnya pengetahuan untuk bahan mengambil keputusan	3	3	100.00	-	3	3	100.00		
	FGD dan Rapat Koordinasi antar lembaga	Terjalinya komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien	6	6	100.00	-	5	6	120%		

Ditetapkan di Tomohon

Pada tanggal 12 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Novie T. Runtukahu